KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Atasi Konflik Di Rempang : Investasi Tak Abaikan Warga
Tanggal : Kamis, 12 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Atasi Konflik Di Rempang

Investasi Tak Abaikan Kepentingan Warga

ANGGOTA Komisi VI DPR Herman Khaeron mengapresiasi langkah Pemerintah terus membangun kepercayaan warga Pulau Rempang agar Investasi Rempang Eco City berlanjut. Aksi penolakan warga terhadap investasi ini tak lepas dari informasi hoaks yang berseliweran di tengah-tengah publik.

"Ada banyak (informasi hoaks), bahwa ada persaingan perusahaan di situ dan lain sebagainya. Tetapi kita dudukkanlah, bagaimana BP Batam menyelesaikan persoalan ini," kata Herman kepada wartawan, Selasa (10/10).

Menurut politisi yang akrab disapa Hero itu, investasi Pulau Rempang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dan juga ekonomi warga Pulau Rempang. Namun, Pemerintah juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat agar tidak ada klaim bahwa negara mengabaikan rakyatnya.

"Investasi ini penting bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih penting keberadaan masyarakat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari eksistensi dan keberadaan negara," ucapnya.

Hero mengatakan, Pemerintah dan masyarakat Pulau Rempang harus duduk bersama untuk menentukan arah pembangunan di kawasan Pulau Rempang. Sebab, masyarakat juga memiliki hak yang sama dan harus perhatikan oleh negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Selain itu, masyarakat juga sudah menempati wilayah tersebut sejak lama dan tentunya hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah.

"Memang kawasan itu ditetapkan menjadi hak pengelolaannya negara melalui BP Batam. Tapi hak pengelolaan negara dalam kepemilikan tanah diatur juga dalam undang-undang tanah," ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat bisa duduk bersama dengan BP Batam, kemudian membicarakan apa yang terbaik untuk investasi di sana.

"Mudah-mudahan justru bisa berdampingan. Apakah berdampingan dalam satu kawasan atau berdampingan direlokasi dalam kawasan lain dengan cara-cara yang bermartabat," jelasnya.

Diingatkannya, di banyak negara kekayaan tradisional itu dihormati dan bisa berdampingan dengan pembangunan di sekitarnya.

"Di negara maju juga direlokasi tapi ke tempat yang lebih layak, lebih bermartabat dan tentu sesuai dengan harapan masyarakat yang direlokasi," tandasnya. ■ KAL